

Dekonstruksi Otoritas Keilmuan dalam Pendidikan Islam Kontemporer: Tantangan Algoritma, Popularitas, dan Pergeseran Makna Ulama

Isnun Qurota Ayuni *¹

Siti Amsa Hulwana ²

Nurul Mubin ³

^{1,2,3} Universitas Sains Al-Qur'an

*e-mail: Isnunqurotaayuni77@gmail.com ¹, amsahul77@gmail.com ², mubin@unsiq.ac.id ³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam hal otoritas keilmuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekonstruksi otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam yang dipengaruhi oleh dominasi algoritma media sosial, budaya popularitas, serta pergeseran makna ulama di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis terhadap karya-karya ilmiah cendekiawan Indonesia serta fenomena dakwah digital yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma digital telah berfungsi sebagai otoritas baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan keislaman, di mana legitimasi keagamaan lebih ditentukan oleh tingkat popularitas dan keterlibatan pengguna dibandingkan kedalaman keilmuan. Budaya popularitas melahirkan otoritas keagamaan instan yang cenderung mengaburkan batas antara kompetensi ilmiah dan figur publik. Selain itu, terjadi pergeseran makna ulama dari otoritas keilmuan berbasis tradisi ilmiah dan moral menuju figur populer di media digital, yang berdampak pada fragmentasi pemahaman keagamaan dan melemahnya etika keilmuan dalam pendidikan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa dekonstruksi otoritas keilmuan membawa tantangan serius sekaligus peluang strategis bagi pendidikan Islam kontemporer. Diperlukan upaya rekonstruksi otoritas ulama melalui penguatan literasi digital, integritas keilmuan, dan pendekatan pendidikan Islam yang integratif serta kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan Islam.

Kata kunci: otoritas keilmuan, pendidikan Islam kontemporer, algoritma digital, popularitas, ulama.

Abstract

The rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to the landscape of contemporary Islamic education, particularly in relation to scholarly authority. This article aims to analyze the phenomenon of the deconstruction of scholarly authority in contemporary Islamic education, which is influenced by the dominance of social media algorithms, the culture of popularity, and the shifting meaning of ulama in the public sphere. This study employs a qualitative approach using library research and critical discourse analysis of scholarly works by Indonesian Muslim intellectuals as well as the growing phenomenon of digital da'wah in society. The findings indicate that digital algorithms have emerged as a new form of authority in the production and dissemination of Islamic knowledge, where religious legitimacy is increasingly determined by popularity and audience engagement rather than by scholarly depth and methodological rigor. The culture of popularity has given rise to instant religious authority, blurring the distinction between genuine scholarly competence and public visibility. Furthermore, there is a noticeable shift in the meaning of ulama from scholarly authorities rooted in intellectual tradition and moral integrity to popular public figures in digital media, resulting in fragmented religious understanding and the erosion of scholarly ethics within Islamic education. This article concludes that the deconstruction of scholarly authority poses both serious challenges and strategic opportunities for contemporary Islamic education. It calls for the reconstruction of ulama authority through the strengthening of digital literacy, scholarly integrity, and integrative, contextual approaches to Islamic education in order to remain relevant to contemporary developments without losing the foundational traditions of Islamic scholarship.

Keywords: scholarly authority, contemporary Islamic education, digital algorithms, popularity, ulama.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang masif telah mengubah secara fundamental cara umat Islam memperoleh, memahami, dan mempraktikkan pengetahuan keagamaan. Jika sebelumnya otoritas keilmuan Islam berpusat pada lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren, madrasah, dan majelis ilmu, kini sumber rujukan keagamaan semakin terfragmentasi melalui ruang digital. Kondisi ini menandai pergeseran epistemologis dalam pendidikan Islam, di mana proses transmisi ilmu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh struktur keilmuan yang mapan, melainkan oleh logika media dan teknologi informasi (Azyumardi Azra, 2012). Dalam konteks Indonesia, ulama secara historis memiliki posisi sentral sebagai penjaga otoritas keilmuan, moral, dan sosial. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai penafsir realitas sosial dan penjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Otoritas ulama dibangun melalui proses panjang berupa penguasaan disiplin ilmu keislaman, sanad keilmuan, integritas akhlak, serta pengabdian sosial. Namun, perkembangan media digital telah menggeser pola legitimasi tersebut ke arah pengakuan berbasis popularitas dan visibilitas publik (Zamakhsari Dhofier, 2011).

Algoritma media sosial memainkan peran dominan dalam menentukan wacana keagamaan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Algoritma bekerja dengan prinsip keterlibatan (*engagement*), bukan validitas keilmuan. Akibatnya, konten keagamaan yang provokatif, emosional, dan simplifikatif lebih mudah tersebar dibandingkan kajian ilmiah yang sistematis. Fenomena ini mendorong lahirnya “ustaz selebritas” yang otoritasnya dibangun bukan atas dasar kedalaman ilmu, melainkan kemampuan komunikasi dan daya tarik visual di ruang digital (Eko Prasetyo, 2017). Pergeseran tersebut berdampak langsung pada perubahan makna ulama dalam kesadaran publik, khususnya generasi muda Muslim. Ulama tidak lagi dipersepsikan sebagai figur keilmuan yang lahir dari proses intelektual panjang, melainkan sebagai figur publik yang aktif di media sosial dan memiliki banyak pengikut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis otoritas keilmuan, karena masyarakat cenderung menyamakan antara “terkenal” dan “berilmu”, tanpa mempertimbangkan metodologi dan kedalaman pemahaman agama (Haidar Bagir, 2019).

Dalam bidang pendidikan Islam, dekonstruksi otoritas keilmuan ini menghadirkan tantangan serius. Peserta didik semakin terbiasa dengan pengetahuan instan dan fragmentaris, sehingga kurang memiliki kesabaran intelektual untuk mendalami ilmu agama secara komprehensif. Proses pendidikan yang seharusnya membentuk nalar kritis, etika ilmiah, dan kedewasaan spiritual berisiko tereduksi menjadi konsumsi konten keagamaan yang dangkal dan ahistoris (Abdul Munir Mulkhan, 2010). Selain itu, melemahnya otoritas keilmuan juga membuka ruang bagi lahirnya tafsir keagamaan yang tidak bertanggung jawab, bahkan berpotensi menimbulkan polarisasi dan konflik sosial. Ketika otoritas keagamaan tidak lagi berpijak pada tradisi ilmiah yang kokoh, agama rentan dijadikan alat legitimasi kepentingan ideologis dan politik. Oleh karena itu, penguatan kembali peran ulama sebagai otoritas keilmuan yang berakar pada tradisi dan sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman menjadi agenda penting dalam pendidikan Islam kontemporer (Nurcholish Madjid, 1997).

Berdasarkan realitas tersebut, kajian tentang dekonstruksi otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam kontemporer menjadi sangat relevan dan mendesak. Analisis kritis terhadap peran algoritma, budaya popularitas, dan pergeseran makna ulama diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual untuk merumuskan model pendidikan Islam yang mampu

menjaga autentisitas keilmuan sekaligus responsif terhadap tantangan era digital (Amin Abdullah, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-kritis, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena dekonstruksi otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, pola, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata, khususnya terkait perubahan legitimasi ulama di era digital. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial keagamaan secara holistik dan kontekstual (Lexy J. Moleong, 2018). Secara teoritik, penelitian ini berlandaskan pada paradigma kritis, yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang sarat dengan relasi kuasa, termasuk kuasa algoritma dan media digital dalam membentuk otoritas keagamaan. Paradigma ini digunakan untuk mengkritisi pergeseran otoritas ulama dari basis keilmuan menuju basis popularitas, serta dampaknya terhadap pendidikan Islam. Pendekatan kritis relevan untuk membongkar struktur dominasi baru yang bekerja secara halus melalui teknologi dan budaya digital (Amin Abdullah, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang membahas otoritas keilmuan ulama, pendidikan Islam, media digital, dan algoritma. Studi pustaka dipilih karena objek penelitian bersifat konseptual dan diskursif, sehingga membutuhkan analisis mendalam terhadap gagasan para pemikir dan cendekiawan Muslim Indonesia. Metode ini efektif untuk mengkaji perkembangan wacana keislaman dalam konteks perubahan sosial dan teknologi (Mestika Zed, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis wacana kritis untuk membaca teks-teks keagamaan dan konten dakwah digital yang beredar di media sosial. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan yang tersembunyi di balik produksi dan distribusi konten keagamaan populer. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana algoritma dan popularitas membentuk persepsi masyarakat tentang siapa yang dianggap ulama dan otoritatif dalam pendidikan Islam (Eriyanto, 2001).

Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti otoritas keilmuan, algoritma media sosial, budaya popularitas, dan pergeseran makna ulama. Selanjutnya, data dianalisis secara reflektif dan kritis untuk menemukan pola, kontradiksi, serta implikasinya terhadap pendidikan Islam kontemporer (Sugiyono, 2019). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teori, dengan membandingkan berbagai pandangan cendekiawan Indonesia dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Validitas penelitian kualitatif tidak diukur melalui generalisasi statistik, melainkan melalui kedalaman analisis, konsistensi argumentasi, dan relevansi teoritik terhadap konteks yang dikaji. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki kontribusi akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Burhan Bungin, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Algoritma Digital sebagai Otoritas Baru dalam Produksi Pengetahuan Keislaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial telah bertransformasi menjadi otoritas baru dalam menentukan arah dan isi pengetahuan keislaman yang dikonsumsi masyarakat. Algoritma bekerja berdasarkan logika keterlibatan pengguna (likes, shares, views, dan komentar), bukan berdasarkan otoritas keilmuan atau validitas metodologis suatu ajaran. Akibatnya, konten keagamaan yang sederhana, provokatif, dan emosional lebih mudah viral dibandingkan kajian ilmiah yang mendalam dan sistematis. Kondisi ini secara tidak langsung mendekonstruksi otoritas ulama tradisional, karena legitimasi tidak lagi bertumpu pada sanad keilmuan, melainkan pada performativitas digital. Dalam perspektif pendidikan Islam, fenomena ini menggeser orientasi belajar dari proses pencarian ilmu yang mendalam menuju konsumsi informasi keagamaan yang instan dan fragmentaris (Amin Abdullah, 2015).

Lebih lanjut, algoritma tidak bersifat netral, melainkan merefleksikan kepentingan ekonomi dan politik platform digital. Pengetahuan agama diperlakukan sebagai komoditas konten, sehingga nilai kebenaran dan kedalaman makna sering kali dikalahkan oleh nilai jual dan daya tarik visual. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi pendidikan Islam, karena proses internalisasi nilai dan etika keilmuan menjadi tereduksi. Ulama dan pendidik Islam yang tidak adaptif terhadap logika algoritmik berpotensi tersisih dari ruang publik digital, meskipun memiliki otoritas keilmuan yang kuat (Azyumardi Azra, 2012).

2. Budaya Popularitas dan Lahirnya Otoritas Keagamaan Instan

Pembahasan kedua menunjukkan bahwa budaya popularitas telah melahirkan bentuk baru otoritas keagamaan yang bersifat instan dan cair. Popularitas di media sosial sering kali dipersepsikan sebagai legitimasi keilmuan, sehingga figur yang memiliki banyak pengikut dianggap lebih kredibel daripada ulama yang memiliki kompetensi ilmiah mendalam. Fenomena ini menciptakan ilusi otoritas, di mana kemampuan retorika, gaya komunikasi, dan personal branding lebih menentukan daripada penguasaan disiplin ilmu keislaman. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi ini berpotensi menyesatkan peserta didik dalam memilih rujukan keagamaan (Haidar Bagir, 2019).

Budaya popularitas juga memengaruhi cara dakwah dan pendidikan agama disampaikan. Materi keislaman cenderung disederhanakan, dipotong dari konteks ilmiahnya, bahkan direduksi menjadi slogan motivasional. Akibatnya, peserta didik kehilangan kesempatan untuk memahami kompleksitas ajaran Islam secara utuh. Abdul Munir Mulkhan menegaskan bahwa pendidikan Islam seharusnya membentuk kedewasaan berpikir dan spiritualitas, bukan sekadar memenuhi kebutuhan emosional sesaat. Jika popularitas menjadi ukuran utama, maka pendidikan Islam berisiko kehilangan fungsi kritis dan transformatifnya (Abdul Munir Mulkhan, 2010).

3. Pergeseran Makna Ulama: dari Otoritas Keilmuan ke Figur Publik

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna ulama dalam kesadaran masyarakat Muslim kontemporer. Ulama tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam yang memiliki otoritas ilmiah dan moral, melainkan sebagai figur publik yang aktif di media dan memiliki pengaruh sosial luas. Pergeseran ini tidak sepenuhnya negatif, namun menjadi problematis ketika popularitas menggantikan kompetensi sebagai dasar legitimasi. Dalam tradisi Islam Nusantara, ulama memiliki peran multidimensional: pendidik, penjaga moral,

dan perekat sosial. Reduksi makna ulama menjadi sekadar “influencer agama” berpotensi menghilangkan dimensi keilmuan dan etika tersebut (Zamakhsari Dhofier, 2011).

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa ulama seharusnya berperan sebagai penjaga nilai-nilai universal Islam, bukan sekadar penyampai opini populer. Ketika ulama kehilangan otoritas keilmuan, masyarakat akan mengalami kebingungan epistemologis dalam membedakan antara ajaran yang berbasis ilmu dan sekadar opini personal. Dalam jangka panjang, pergeseran makna ini dapat melemahkan fondasi pendidikan Islam yang bertumpu pada tradisi keilmuan dan adab dalam menuntut ilmu (Nurcholish Madjid, 1997).

4. Implikasi Dekonstruksi Otoritas Keilmuan terhadap Pendidikan Islam Kontemporer

Dekonstruksi otoritas keilmuan membawa implikasi langsung terhadap praktik dan orientasi pendidikan Islam. Peserta didik semakin terbiasa mengakses pengetahuan agama secara individual dan otodidak melalui media digital, tanpa bimbingan guru atau ulama yang kompeten. Hal ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang parsial, tekstual, bahkan kontradiktif. Pendidikan Islam yang idealnya membentuk integrasi antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas menjadi terfragmentasi oleh logika konsumsi informasi (Azyumardi Azra, 2012).

Namun demikian, dekonstruksi ini juga dapat dibaca sebagai peluang untuk melakukan rekonstruksi otoritas keilmuan yang lebih adaptif. Ulama dan lembaga pendidikan Islam dituntut untuk hadir secara aktif di ruang digital tanpa mengorbankan integritas keilmuan. Amin Abdullah menekankan pentingnya pendekatan integratif-interkoneksi, di mana tradisi keilmuan klasik dikontekstualisasikan dengan tantangan modernitas dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat tetap menjaga autentisitas epistemologisnya sekaligus relevan dengan perkembangan zaman (Amin Abdullah, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam kontemporer tengah menghadapi tantangan serius berupa dekonstruksi otoritas keilmuan, yang dipicu oleh dominasi algoritma digital, budaya popularitas, dan pergeseran makna ulama di ruang publik. Algoritma media sosial telah berfungsi sebagai otoritas baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan keislaman, di mana legitimasi tidak lagi ditentukan oleh kedalaman keilmuan dan sanad ilmiah, melainkan oleh tingkat keterlibatan dan popularitas konten. Kondisi ini menyebabkan pengetahuan agama cenderung bersifat instan, fragmentaris, dan kehilangan kedalaman metodologis. Budaya popularitas semakin memperkuat pergeseran tersebut dengan melahirkan otoritas keagamaan yang bersifat cair dan temporer. Popularitas figur agama di media digital kerap disamakan dengan otoritas keilmuan, sehingga Masyarakat khususnya generasi muda mengalami kebingungan epistemologis dalam membedakan antara ulama yang memiliki kompetensi ilmiah dan figur publik yang hanya mengandalkan daya tarik retorika. Akibatnya, proses pendidikan Islam berisiko mengalami reduksi makna, dari pembentukan nalar kritis dan akhlak ilmiah menuju konsumsi wacana keagamaan yang dangkal dan emosional.

Lebih jauh, pergeseran makna ulama dari otoritas keilmuan menjadi figur publik populer menimbulkan implikasi serius terhadap keberlanjutan tradisi keilmuan Islam. Ulama yang seharusnya berperan sebagai penjaga nilai, etika, dan metodologi keilmuan berpotensi kehilangan wibawa epistemologisnya di tengah arus informasi yang tidak terverifikasi. Hal ini dapat melemahkan fondasi pendidikan Islam yang selama ini bertumpu pada integrasi antara ilmu, adab, dan spiritualitas. Namun demikian, dekonstruksi otoritas keilmuan tidak semata-mata harus dipahami sebagai ancaman, melainkan juga sebagai peluang untuk melakukan rekonstruksi otoritas ulama yang lebih kontekstual dan adaptif. Pendidikan Islam dituntut untuk merumuskan strategi baru dengan memperkuat literasi digital, etika keilmuan, serta kehadiran ulama dan institusi pendidikan Islam di ruang digital tanpa mengorbankan integritas tradisi ilmiah. Dengan demikian, pendidikan Islam kontemporer diharapkan mampu menjaga autentisitas keilmuan sekaligus menjawab tantangan zaman secara kritis dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2015). *Islam dan Ilmu Pengetahuan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bagir, Haidar. (2019). *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. (2010). *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Eko. (2017). *Demokrasi Digital dan Otoritas Publik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.